

BAB I

PENDAHULUAN

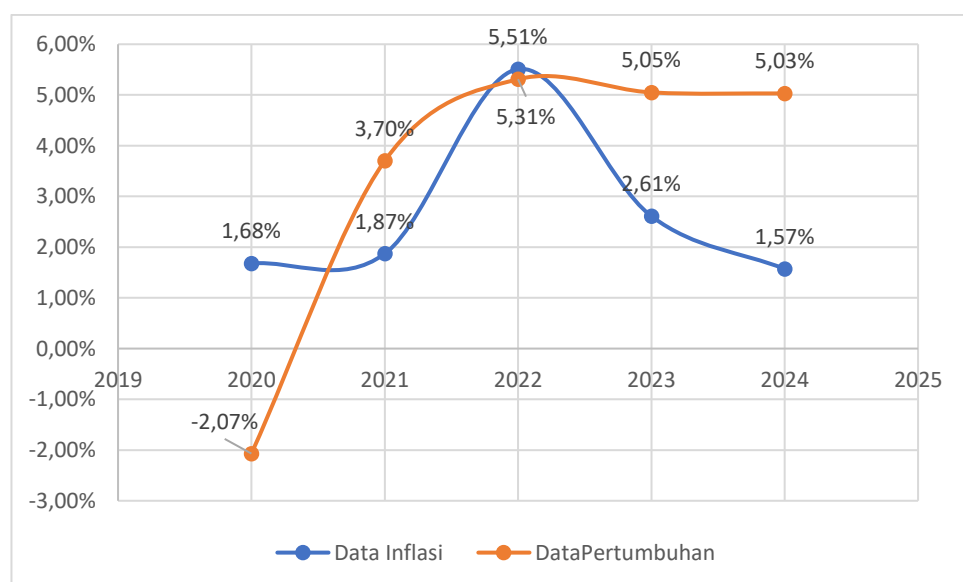
1.1 Latar Belakang

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dan menjadi topik sentral dalam diskusi makroekonomi di kalangan ekonomi, pembuat kebijakan dan otoritas moneter di berbagai negara (Wollie, 2018). Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi daerah/nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya diharapkan oleh setiap negara karena mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan (Desfitra *et al.*, 2024).

Dalam konteks pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan yang senantiasa harus dicapai oleh pemerintah karena dapat mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kemakmuran secara berkelanjutan. Banyak faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, seperti ketersediaan tenaga kerja, akumulasi modal, perkembangan teknologi, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Namun, di antara berbagai faktor tersebut, stabilitas menjadi salah satu aspek penting yang sering dikaitkan dengan keberlanjutan pertumbuhan, stabilitas pertumbuhan sangat bergantung pada kondisi makroekonomi. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat tingkat stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi, (Ronaldo 2019).

Inflasi tidak hanya menjadi permasalahan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga bagi negara maju (Puspita *et al.*, 2024). Inflasi juga mencerminkan salah satu indikator makroekonomi yang

mencerminkan proses naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu tertentu. Inflasi pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan dalam pembentukannya, baik dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), sisi penawaran (*cost push inflation*), maupun faktor struktural seperti distribusi barang dan ketergantungan terhadap impor. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi *cost push inflation* dan *demand push inflation* digambarkan sebagai *output riil* yang melebihi *output* potensialnya, atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dibandingkan dengan kapasitas perekonomian (Kusumaningrum & Palupi, 2022).



Sumber Data: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah
Peneliti

**Gambar 1.1 Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Tahun 2020-2024**

Gambar 1.1 memperlihatkan fluktuasi inflasi yang telah terjadi di Indonesia selama lima tahun terakhir, serta dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pertumbuhan Ekonomi. Di tahun 2020, Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,68 persen, yang relatif rendah akibat turunnya konsumsi dan aktivitas ekonomi sebagai dampak dari diberlakukannya

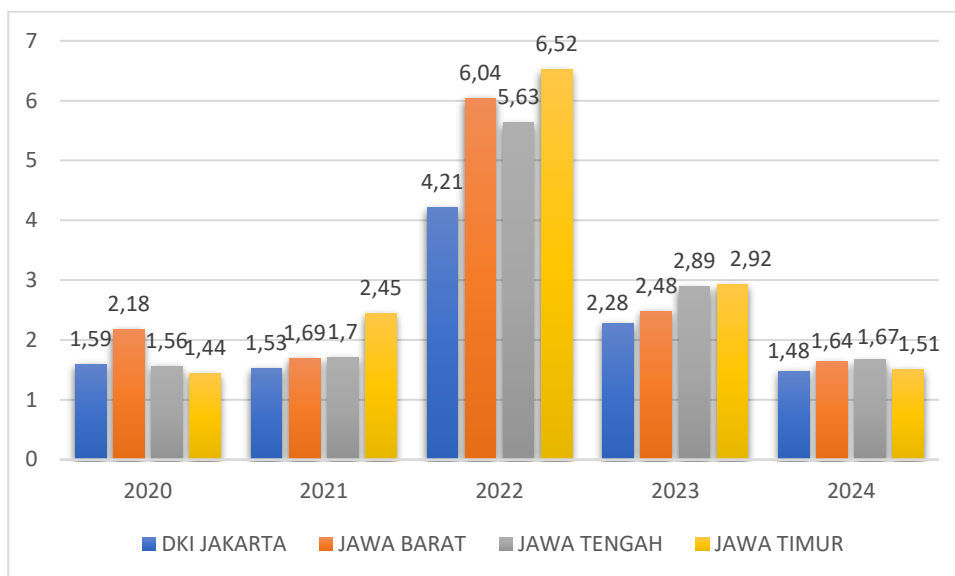
pembatasan sosial untuk menekan penyebaran COVID-19. Pada saat yang sama Indonesia mengalami penurunan tajam pada pertumbuhan ekonomi yang tercatat di angka -2,1 persen. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19, yang mengakibatkan kontraksi ekonomi besar-besaran. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan tajam pada sektor perdagangan, pariwisata, dan transportasi, yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Hamzah *et al.*, 2021).

Pada tahun 2021, inflasi sedikit meningkat menjadi 1,87 persen seiring pelonggaran pembatasan sosial yang kemudian dapat mendorong ekonomi pulih menjadi 3,7 persen, menunjukkan adanya proses pemulihan setelah dampak pandemi. Tahun selanjutnya 2022, inflasi melonjak 5,51 persen, yang disebabkan kenaikan harga energi dan harga pangan, serta gangguan pasokan akibat masalah supply chain global. Dalam Laporan Perekonomian Indonesia (2022), mencatat bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan ketegangan geopolitik, seperti perang Ukraina, menyebabkan kelangkaan bahan baku dan energi yang menghambat distribusi barang-barang penting, yang berimbas pada lonjakan harga pangan dan energi. Perubahan pasokan global juga memperburuk inflasi di Indonesia. Di tahun 2023-2024 inflasi kembali turun dan bergerak stabil di kisaran 2,61 persen hingga 1,57 persen, mencerminkan keberhasilan upaya pengendalian harga serta pulihnya aktivitas ekonomi setelah guncangan pandemi dan gejolak global.

Bank sentral menerapkan kebijakan moneter baru berupa Inflation Targeting Framework (ITF), yang menetapkan target inflasi dan diberlakukan mulai juli 2005 (Bank Indonesia, 2023). Berbagai studi tentang ITF telah dilakukan di berbagai negara (Akinsola & Odhihambo, 2017), termasuk di Indonesia. Penerapan

kebijakan ini tentunya tidak lepas dari pengalaman inflasi tinggi yang pernah terjadi pada pasca krisis 1998, yang menekan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Melalui ITF, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah setiap tahunnya menetapkan target inflasi sebagai acuan. Penetapan target inflasi ini bertujuan menjaga ekspektasi masyarakat, meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia (BI), serta memastikan bahwa inflasi tetap berada pada tingkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Dengan penerapan ITF, diharapkan Bank Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam mengendalikan inflasi (Saragih, 2015).

Berkaitan dengan ekonomi makro, inflasi dianggap memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun sifat hubungan tersebut sering kali tidak bersifat linear. Kremer *et al.*, (2013) menegaskan bahwa inflasi memiliki efek ganda terhadap perekonomian, di mana inflasi yang rendah masih mendukung perekonomian, tetapi inflasi tinggi memunculkan distorsi dan menghambat aktivitas riil. Barro, (1995) mengatakan bahwa inflasi yang meningkat akan menurunkan akumulasi modal dan produktivitas. Inflasi yang melebihi ambang batas berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta menekan minat investasi, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu ketidakstabilan ekonomi (S *et al.*, 2023). Kondisi ini sejalan dengan konsep *threshold inflation* yang dikemukakan oleh Aziz & Nasrudin, (2016) yang menjelaskan bahwa inflasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang terlalu tinggi berdampak buruk bagi pertumbuhan. Karena itu, memahami pola inflasi dan ambang batasnya penting agar kebijakan di Jawa Timur bisa menstabilkan harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



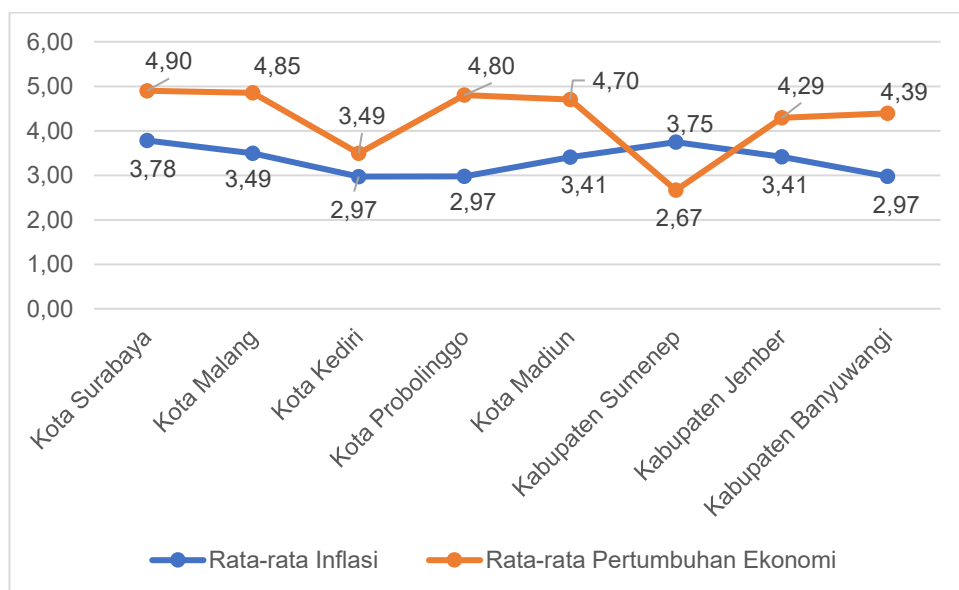
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah Peneliti

Gambar 1.2 Perbandingan Angka Inflasi Provinsi Jawa Timur dan tiga Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan gambar 1.2 yang menunjukkan jika Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir mengalami inflasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Misalnya, ketika seluruh provinsi mengalami lonjakan inflasi pada tahun 2022, Jawa Timur mencatat nilai tertinggi sebesar 6,52 persen melampaui 3 provinsi lainnya. Selain itu, pada tahun lainnya, inflasi di Jawa Timur cenderung sedikit lebih tinggi di atas provinsi lainnya, mencerminkan tekanan harga yang lebih kuat. Kondisi tersebut menjadi alasan penting mengapa Jawa Timur layak dianalisis dalam konteks threshold inflation. Dengan adanya kecenderungan inflasi yang relatif lebih tinggi dan bergejolak dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, diperlukan pemahaman mengenai pada titik berapa inflasi mulai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Jawa Timur juga dikenal sebagai pusat industri dan keuangan Kawasan Timur Indonesia (Assidikiyah *et al.*, 2021). Delapan Kabupaten/Kota yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Jember, Banyuwangi, Sumenep, Probolinggo, dan Madiun. Indeks Harga Konsumen (IHK)

digunakan sebagai ukuran inflasi karena menunjukkan dinamika harga sejumlah barang dan jasa. Selain itu, IHK menjadi salah satu parameter penting untuk melihat stabilitas ekonomi (Wahyudi *et al.*, 2021). Oleh Karena itu, pengamatan dan penjelasan data IHK baik secara umum maupun secara rinci perlu disampaikan untuk memudahkan pemangku kebijakan, ekonom, pengusaha dan akademisi dalam menganalisis inflasi (BPS, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah Peneliti

Gambar 1.3 Rata-rata Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023

Gambar 1.3 memperlihatkan rata-rata inflasi dan pertumbuhan ekonomi di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama Periode tahun 2014-2023. Inflasi daerah di Indonesia secara resmi diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung pada kabupaten/kota tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Timur, data IHK tahun 2023 hanya tersedia untuk delapan Kabupaten/Kota, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun (BPS, 2024). Oleh karena itu,

analisis inflasi daerah dalam penelitian ini difokuskan pada Kabupaten/Kota yang memiliki data IHK yang tersedia secara konsisten.

Kota Surabaya dan Kota Malang Inflasi yang relatif terkendali dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, masing-masing 4,90 persen dan 4,85 persen, mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih baik, seiring dengan peran mereka sebagai pusat perdagangan dan industri di Jawa Timur. Di sisi lain, Kabupaten Sumenep menunjukkan inflasi yang lebih tinggi 3,75 persen dan pertumbuhan yang lebih rendah 2,79 persen, yang mencerminkan ketergantungan yang lebih besar pada sektor pertanian, yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan dan kondisi musiman. Sementara itu, Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Kota Probolinggo menunjukkan inflasi moderat dan pertumbuhan yang relatif stabil, dengan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,29 persen hingga 4,80 persen, meskipun mereka masih menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan harga dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Secara keseluruhan, perbedaan karakteristik ekonomi antar daerah ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan inflasi yang lebih terfokus dan berbasis data regional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Timur.

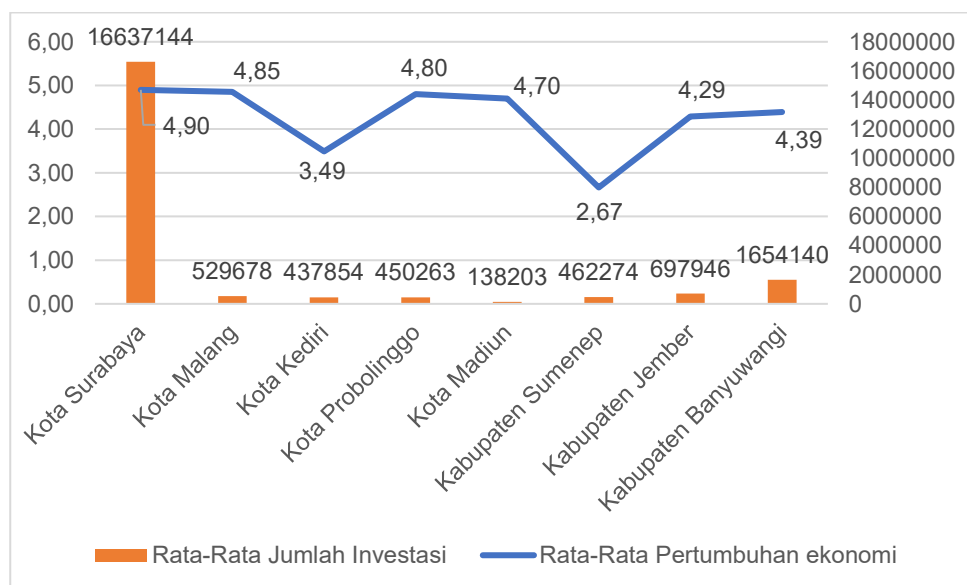
Sejauh ini penelitian tentang ambang batas inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak diteliti. Seperti yang dilakukan oleh (Kusumatriisna *et al.*, 2019), penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bersifat tidak linier, di mana inflasi yang melebihi ambang batas tertentu dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel provinsi tahun 1994–2017, hasil penelitian menemukan dua titik ambang batas yaitu pada tingkat inflasi 5,09 persen dan 9,57–9,59 persen. Inflasi di bawah 5,09 persen tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, namun ketika melebihi angka tersebut, perekonomian mulai melambat, dan pada saat inflasi melewati 9,57 persen, dampaknya menjadi negatif dan signifikan. Dengan demikian, inflasi yang tinggi dan berfluktuasi terbukti berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya peran Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali di bawah batas aman tersebut.

Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ramadhaniyati *et al.*, 2023), penelitian ini juga menegaskan bahwa hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga bersifat nonlinier dengan adanya efek ambang batas (*Threshold effect*). Menggunakan data panel 34 provinsi selama periode 2014-2021, hasil menunjukkan bahwa ketika diuji secara linear, inflasi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil uji model threshold menemukan titik ambang pada tingkat inflasi 2,11 persen, di mana inflasi di bawah nilai tersebut berdampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi di atas ambang tersebut tidak lagi berpengaruh signifikan dan cenderung memperlambat pertumbuhan. Temuan ini menegaskan bahwa inflasi rendah dapat mendorong pertumbuhan, tetapi inflasi tinggi justru menghambat perekonomian, sehingga diperlukan kebijakan pengendalian inflasi yang konsisten untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain inflasi, ada faktor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu investasi, dimana investasi dapat menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Harrod-Domar, investasi merupakan motor utama melalui dua mekanisme yakni kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan (Domar, 1946, Harrod, 1939). Hal ini menjelaskan bahwa

daerah dengan investasi yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan *output* yang lebih kuat. Investasi dapat meningkatkan pada sektor ekonomi, melalui transfer teknologi dan penciptaan kesempatan kerja, investasi dapat meningkatkan perkembangan berbagai sektor ekonomi dan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, investasi menjadi faktor yang sangat krusial bagi negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Darwanti *et al.*, 2021).



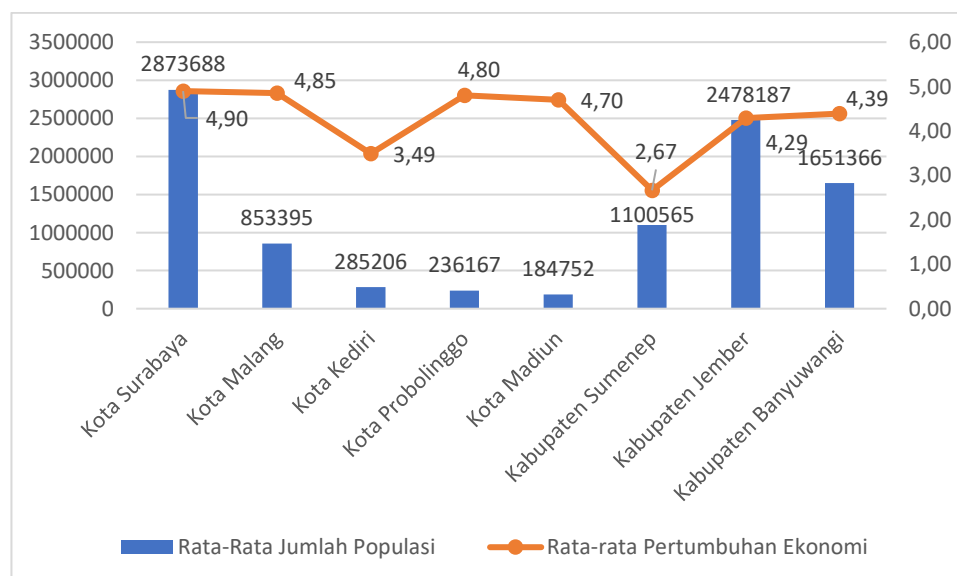
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Peneliti

Gambar 1.4 Rata-rata Jumlah investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.4, rata-rata jumlah investasi dan pertumbuhan ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan perbedaan antarwilayah. Kota Surabaya memiliki rata-rata investasi tertinggi sebesar 16,6 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 4,90 persen, sedangkan Kabupaten Banyuwangi mencatat investasi sebesar 1,65 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 4,39 persen. Sebaliknya, Kota Madiun memiliki rata-rata investasi terendah sebesar 138 miliar rupiah dengan pertumbuhan ekonomi 4,70 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingginya investasi tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan

adanya faktor lain yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga analisis mengenai dinamika inflasi dan penentuan threshold inflation menjadi penting untuk dilakukan.

Selain investasi, populasi juga memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Todaro & Smith, (2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dapat memperluas tenaga kerja dan permintaan agregat, namun tanpa peningkatan produktivitas, populasi tinggi justru menciptakan tekanan ekonomi. Dengan demikian, dinamika jumlah penduduk/ populasi menjadi faktor struktural yang mempengaruhi kapasitas pertumbuhan daerah. Di sisi lain, populasi yang tinggi menyediakan sumber daya manusia yang melimpah serta menciptakan permintaan agregat terhadap barang dan jasa, sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Namun, apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja, maka dapat menimbulkan tekanan terhadap perekonomian seperti meningkatnya pengangguran dan inflasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah Peneliti

Gambar 1.5 Rata-rata jumlah populasi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.5, rata-rata jumlah populasi dan pertumbuhan ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan variasi antarwilayah. Kota Surabaya memiliki rata-rata jumlah populasi terbesar yaitu 2.873.688 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90 persen, diikuti Kabupaten Jember sebanyak 2.478.187 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi 4,29 persen. Sementara itu, Kota Madiun memiliki rata-rata jumlah populasi terendah yaitu 184.752 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi 4,70 persen. Perbedaan jumlah penduduk tersebut mencerminkan variasi kapasitas tenaga kerja dan ukuran pasar di masing-masing daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar tidak selalu memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, populasi menjadi salah satu faktor yang penting untuk dianalisis karena berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian sebelumnya sejauh ini yang mengenai ambang batas inflasi di Indonesia masih didominasi level nasional maupun provinsi sehingga belum merangkap pada Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Jawa Timur. Mayoritas studi menggunakan data nasional atau provinsi sehingga belum mampu menangkap perbedaan struktur harga dan dinamika pertumbuhan antar wilayah yang sangat beragam. Selain itu, sedikit penelitian yang memasukkan variabel kontrol seperti investasi dan populasi secara simultan dalam model threshold. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik pada delapan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur guna mengestimasi ambang batas inflasi yang benar-benar relevan secara regional serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi untuk pengendalian inflasi dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk

mengambil judul: **“Dinamika Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Estimasi Ambang Batas Inflasi di Delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan ambang batas inflasi (*threshold inflation*). Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan mengendalikan variabel investasi dan jumlah populasi?
2. Berapa estimasi ambang batas inflasi (*threshold inflation*) yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan mengendalikan variabel investasi dan populasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di delapan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan mengendalikan variabel investasi dan jumlah populasi sebagai variabel kontrol, sehingga diperoleh estimasi pengaruh inflasi yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi perekonomian daerah secara empiris.
2. Untuk mengestimasi tingkat ambang batas inflasi (*threshold inflation*) yang kondusif bagi pertumbuhan dengan mengendalikan variabel investasi dan populasi sebagai variabel kontrol. Penetapan ambang batas inflasi menjadi relevan agar inflasi tetap berada pada tingkat yang kondusif bagi pertumbuhan

ekonomi. Dengan mengetahui batas optimal tersebut, kebijakan pengendalian inflasi dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah literatur tentang hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan konsep *threshold inflation* yang masih jarang diteliti di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi-studi lanjutan yang ingin mengkaji dinamika makroekonomi di Jawa Timur maupun daerah lain di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dan Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Dengan mengetahui ambang batas inflasi yang aman bagi pertumbuhan, kebijakan moneter maupun fiskal dapat diarahkan lebih tepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pembangunan ekonomi. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya menjaga inflasi tetap terkendali agar kesejahteraan tidak terganggu. Adapun bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi media untuk mengasah kemampuan analisis dan menerapkan teori ekonomi makro ke dalam kondisi nyata di Jawa Timur.